

Kamis, 4 Mei 2023

1. [HOAKS] Presiden Jokowi Usir Prabowo dari Istana Negara



Penjelasan :

Beredar sebuah unggahan video yang memuat informasi bahwa Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diusir oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari Istana Negara. Pada video tersebut dituliskan "DI USIR PAKSA DARI ISTANA JOKOWI MARAH BESAR, NIAT BUSUK PRABOWO TERBONGKAR".

Dilansir dari Cek Fakta [merdeka.com](https://www.merdeka.com), diketahui bahwa klaim yang terdapat pada video tersebut mengenai Presiden Jokowi usir Menhan Prabowo Subianto adalah hoaks. Dari keseluruhan video yang berdurasi 6 menit 56 detik, tidak ditemukan pernyataan soal pengusiran Menhan Prabowo dari Istana Negara dan tidak ada informasi valid yang mendukung klaim tersebut. Isi video di antaranya menampilkan Menhan Prabowo saat menghadiri silaturahmi Nasional Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Tahun 2022 pada 5 Agustus 2022.

Hoaks

Link Counter:

- <https://www.merdeka.com/cek-fakta/cek-fakta-hoaks-presiden-jokowi-usir-prabowo-subianto-dari-istana-negara.html>
- <https://www.youtube.com/watch?v=AlRder3YrRI>

Kamis, 4 Mei 2023

2. [HOAKS] Surat Elektronik Pemberitahuan Wajib Pajak Mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)



Penjelasan :

Beredar surat elektronik mengenai pemberitahuan wajib pajak mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Surat elektronik tersebut dikirim melalui alamat efiling@direktoratpajak.online yang dilengkapi dengan logo Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan DJP.

Faktanya, surat elektronik mengenai pemberitahuan wajib pajak mengatasnamakan DJP adalah tidak benar. DJP melalui akun Twitter resminya [@DitjenPajakRI](https://twitter.com/DitjenPajakRI), menegaskan bahwa pihaknya hanya menggunakan domain “@pajak.go.id” sebagai alamat surat elektronik resmi. DJP juga mengimbau agar masyarakat dapat mengabaikan surat elektronik selain dari domain surat elektronik resmi DJP.

Hoaks

Link Counter:

- <https://twitter.com/DitjenPajakRI/status/1654026677754925059?s=20>

Kamis, 4 Mei 2023

3. [DISINFORMASI] Penonaktifan NIK Warga DKI Jakarta yang Tak Lagi Tinggal di Jakarta



Penjelasan :

Beredar di media sosial Facebook sebuah unggahan yang berisi informasi yang menyebutkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menonaktifkan KTP elektronik warga DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di Jakarta. Kebijakan tersebut sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rencana pemindahan ibu kota negara pada 2024.

Faktanya, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi DKI Jakarta Budi Awalludin mengklarifikasi bahwa penonaktifan KTP elektronik warga DKI Jakarta yang sudah tidak tinggal di Jakarta sampai saat ini masih dalam tahap perencanaan dan tidak ada kaitannya dengan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta. Budi menjelaskan bahwa kebijakan penonaktifan NIK itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya menertibkan administrasi kependudukan di mana penduduk ber-KTP DKI Jakarta harus secara *de facto* tinggal di wilayah DKI Jakarta. Dengan penertiban administrasi kependudukan, pemberian bantuan sosial kepada warga pun dapat lebih tepat sasaran dan akurat.

Disinformasi

Link Counter:

- <https://news.detik.com/berita/d-6702418/beredar-chat-e-ktp-warga-dki-dinonaktifkan-mulai-juni-dukcapil-tidak-benar>
- <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/03/17545421/pemprov-bakal-nonaktifkan-nik-warga-dki-yang-tak-lagi-tinggal-di-jakarta?page=all>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230503194518-20-944932/disdukcapil-dki-sebut-penonaktifan-e-ktp-jakarta-bulan-juni-hoaks>